



Penguatan Kapasitas Manajerial BUMDes Bangun Mandiri Melalui Optimalisasi UMKM Produk Lokal untuk Peningkatan Ekonomi Desa Bekiung

Kholilul Kholik¹, Ahmad Taufik², Siti Hajar³, Nur Ambia Arma⁴

^{1,2} Universitas Pembangunan Panca Budi, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia

³ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia

⁴ Universitas Terbuka, Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: 27 Maret 2025
Revised: 10 Juni 2025
Available online: 30 Juni 2025

KEYWORDS

BUMDes, MSMEs, Managerial Capacity, Local Products

CORRESPONDENCE

Name: Siti Hajar
E-mail: sitihajar@umsu.ac.id

A B S T R A C T

This Community Service Program (PKM) aims to strengthen the managerial capacity of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) "Bangun Mandiri" in Bekiung Village through optimization of micro, small, and medium enterprises (UMKM) based on local products to encourage the improvement of the village economy. The methods used in this activity include need assessment for mapping local problems and potentials, a participatory approach in community involvement, training to strengthen BUMDes managerial capacity, and mentoring for local business incubation based on village potential. The results of the activity showed a significant increase in the understanding and managerial skills of BUMDes administrators, as well as the development of local MSME capacity in terms of legality, branding, and digital marketing. This activity proves that the synergy between strengthening village institutions and empowering the community economy based on local products can be an effective strategy in encouraging the independence and sustainability of the village economy.

Pendahuluan

Unit pemerintahan terkecil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan disebut desa. Pemerintahan desa ini juga berperan penting dalam pembangunan yang berlangsung bersentuhan dengan masyarakat. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, termasuk dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, termasuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk mengelola potensi ekonomi lokal guna meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat. BUMDes dirancang bukan hanya sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan berbasis masyarakat, inklusif dan berkelanjutan (Sembiring, 2017).

BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa yang didirikan desa dan berbadan hukum, berdasarkan peraturan desa yang diterbitkan oleh pemerintah desa Berdasarkan PP 11 Tahun 2021, maka fungsi pembentukan BUMDes yang bertujuan: 1) melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa; 2) melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa; 3) memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa; 4) pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa; 5) mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa (Sopanah, 2023).

Syarifudin & Astuti (2020) menjelaskan bahwa BUMDes yang dibentuk sebagai sebuah pendekatan baru untuk mengelola dan mengembangkan potensi desa yang dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh



Gambar 2. Limbah Pertanian



Gambar 3. Limbah Sayuran dan Buah-buahan

Salah satu upaya yang dilakukan dalam penguatan manajerial BUMDes adalah dengan mengembangkan beberapa potensi desa yang dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk produksi UMKM, yaitu dengan memanfaatkan limbah pertanian, sayuran dan buah-buahan menjadi bahan pakan ternak sebagai upaya mendukung budidaya dan penggemukan sapi juga sebagai pupuk organik di sektor pertanian. Pengelolaan limbah ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya dapat mewujudkan Desa Bekiung menjadi Desa Mandiri dengan berkembangnya BUMDes Bangun Mandiri, juga sebagai upaya pengembangan sektor pertanian dan peternakan dan juga bertujuan untuk menimalisir jumlah pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Bekiung. Namun, dalam mengembangkan potensi ini masih mengalami hambatan dan tantangan yang harus dihadapi oleh BUMDes Bangun Mandiri yaitu kelemahan manajerial, keterbatasan inovasi produk, dan akses pasar dalam memasarkan hasil olahan dari produk lokal UMKM karna belum mempunyai legalitas yang sah. Berdasarkan hal inilah, maka sangat perlu adanya pendampingan manajerial untuk perangkat BUMDes Bangun Mandiri Desa Bekiung, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan perekonomian desa.

Penguatan kapasitas manajerial BUMDes menjadi sangat penting karena BUMDes memiliki peran ganda: sebagai lembaga ekonomi desa sekaligus motor penggerak pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola BUMDes dalam hal perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, pemasaran, dan pelaporan akuntabel. Salah satu pendekatan yang terbukti efektif adalah pelatihan berbasis studi kasus lokal dan metode partisipatif, di mana masyarakat dan pelaku UMKM dilibatkan secara aktif dalam proses pengembangan unit usaha BUMDes. Optimalisasi UMKM sebagai bagian dari strategi bisnis BUMDes juga sangat penting, mengingat UMKM merupakan tulang punggung ekonomi desa. Produk lokal seperti olahan hasil pertanian, kerajinan bambu, atau makanan tradisional memiliki potensi pasar yang luas jika dikemas dan dipasarkan dengan baik. Salah satu

UMKM pengolahan hasil pertanian yang menjadi produk lokal adalah yang bersumber dari limbah pertanian yang dimaksud adalah pelepah sawit, jerami padi, tongkol jagung termasuk limbah sayuran dan buah-buahan karena BUMDes Bangun Mandiri berharap dapat mengembangkan sektor pertanian dan peternakan menjadi sektor unggulan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yang tidak hanya hasilnya tetapi juga limbahnya.

Metode Pengabdian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode Partisipatory Rural Appraisal (PRA). Seperti yang dijelaskan oleh [Mustanir & Lubis \(2017\)](#) bahwa PRA adalah mengungkapkan metode yang bertujuan untuk mengakomodasi masyarakat untuk terlibat langsung dalam setiap kegiatan ini yang meliputi persiapan, rencana, pengawasan, evaluasi dari program yang dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahapan yaitu Need Assessment dan Pendekatan Partisipatif, dan pelatihan penguatan kapasitas manajerial, dan pendampingan inkubasi bisnis lokal. Menurut [Rega & Baldizzone, 2015](#)). Pendekatan partisipatif merupakan strategi paling efektif untuk menggali aspirasi dan kebutuhan lokal secara holistik, serta menciptakan rasa kepemilikan atas solusi yang dikembangkan. Sementara itu, dalam memberikan pendampingan inkubasi sangat cocok dalam menghasilkan produk lokal unggulan, seperti yang dikemukakan oleh [Winarsih & Resmawa \(2024\)](#), yang menekankan pentingnya fasilitasi sistemik untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal berbasis kewirausahaan komunitas. Tahapan yang dilaksanakan dalam kegiatan PKM ini dituangkan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 4. Pelaksanaan Kegiatan PKM Penguatan Manajerial BUMDes Bangun Mandiri

Hasil dan Pembahasan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di pasal 1 angka 1, 2 dan 3 serta pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) menjelaskan bahwa usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) memegang peranan penting bagi perekonomian nasional. Apabila dihubungkan antara penerapan Undang-Undang Desa dengan Undang-undang UMKM, maka dapat dilakukan melalui penguatan manajemen BUMDes sebagai upaya meningkatkan pendapatan desa ([Rofii & Rahim, 2024](#)). BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang dibentuk oleh desa dan dikelola secara mandiri guna memperkuat perekonomian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, untuk mewujudkan tujuan BUMDes, maka fungsinya harus berjalan dengan optimal, dimana kapasitas manajerial menjadi kunci penting dalam setiap pelaksanaan programnya. Kapasitas manajerial adalah kemampuan untuk mengelola sumber daya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini menegaskan bahwa kapasitas ini mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi usaha yang dijalankan oleh desa ([Ramadhana, 2023](#)).

Potensi yang sudah dimiliki oleh BUMDes Bangun Mandiri sudah memperlihatkan manajemen BUMDes yang professional namun masih perlu adanya pendampingan untuk mengembangkan Lembaga BUMDes melalui UMKM produk lokal yang bertujuan untuk menyalurkan produk-produk unggulan dari BUMDes Bangun Mandiri yang bersumber dari hasil potensi desa. Adapun pendampingan ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara untuk menguatkan manajemen BUMDes Bangun Mandiri melalui UMKM sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan desa. Adapun kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 tahapan yaitu:

1. Need Assesment dan Pendekatan Partisipatif.

Kegiatan pertama yang dilakukan oleh tim dan mitra adalah memberikan pemahaman tentang pengelolaan BUMDes yang baik dan benar dan regulasi-regulasi yang dapat mendukung perkembangan BUMDes Bangun Mandiri ke depannya. Tahapan awal kegiatan ini diawali dengan *need assessment* yang dilakukan secara sistematis melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan pengurus BUMDes, tokoh masyarakat, dan pelaku UMKM. Hasil analisis menunjukkan bahwa BUMDes menghadapi berbagai tantangan seperti lemahnya tata kelola organisasi, kurangnya perencanaan bisnis yang berkelanjutan, dan keterbatasan pemahaman pasar. Pendekatan partisipatif yang diterapkan dalam tahap ini terbukti efektif dalam membangun rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap program. Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program pemberdayaan desa. Melalui pelibatan langsung, masyarakat mampu mengidentifikasi sendiri kekuatan dan potensi lokal, seperti produk olahan berbahan dasar kelapa dan kopi, sebagai basis pengembangan UMKM lokal (Wibowo, 2022).



Gambar 5. Kegiatan Need Assesment melalui FGD

2. Pelatihan Penguatan Kapasitas Manajerial

Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan pelatihan yang difokuskan pada penguatan kapasitas manajerial BUMDes. Materi pelatihan meliputi perencanaan bisnis, pengelolaan keuangan sederhana, tata kelola organisasi, serta pemasaran digital. Kegiatan ini difasilitasi secara kolaboratif antara tim pengabdian dan mitra pendamping UMKM dari lembaga ekonomi lokal. Evaluasi pelatihan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta dalam aspek perencanaan bisnis dan pengelolaan keuangan. Pelatihan manajerial memiliki korelasi positif terhadap peningkatan efisiensi operasional BUMDes. Peserta pelatihan juga menunjukkan antusiasme tinggi dalam memahami strategi digital marketing untuk produk UMKM mereka. Manajemen BUMDes yang dikuatkan dengan peluang bisnis yang diciptakan melalui UMKM dapat meningkatkan kapabilitas masyarakat juga mengembangkan usaha yang berkontribusi pada pendapatan asli desa (PADes). BUMDes diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dengan terbukanya lapangan kerja baru melalui usaha-usaha yang dibangun oleh BUMDes (Redi et al., 2022). Selain itu, pengembangan BUMDes harus didukung oleh sumber daya baik secara kualitas maupun kuantitas, serta didukung oleh teknologi dan inovasi yang dapat mengembangkan potensi desa menjadi produk-produk unggulan. Hal ini sesuai dengan yang telah dilakukan oleh BUMDes Bangun Mandiri dengan menciptakan unit-unit usaha yang dapat memberdayakan masyarakat desa dengan mengembangkan potensi desa yang ada di Desa Bekiung.



Gambar 6. Pelatihan Manajerial BUMDes

3. Pendampingan Inkubasi Bisnis Lokal

Setelah pelatihan, tim melanjutkan dengan fase pendampingan intensif melalui pendekatan inkubasi bisnis. Inkubasi dilakukan dalam tiga aspek utama, yaitu: (1) legalitas dan perizinan usaha, (2) pengembangan kemasan dan branding produk, serta (3) konektivitas pasar melalui media sosial dan platform digital. UMKM yang terlibat terdiri dari pengrajin kelapa olahan, pengolah kopi, dan pengrajin bambu lokal. Hasil yang signifikan terlihat dari perkembangan UMKM kelapa olahan yang berhasil memasarkan produk ke luar desa melalui platform digital. Inovasi dalam kemasan dan narasi produk berbasis kearifan lokal menjadi nilai tambah. Temuan ini sejalan dengan hasil studi oleh [Sidauruk & Simarmata \(2023\)](#) yang menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan dan inovasi produk untuk meningkatkan daya saing UMKM desa. Selain itu, aspek legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan PIRT juga berhasil difasilitasi untuk lima pelaku UMKM. Ini merupakan lompatan besar bagi desa dalam mengintegrasikan usaha lokal dengan sistem ekonomi formal. Selain itu, legalitas usaha menjadi prasyarat utama bagi pelaku usaha kecil dalam mengakses pasar dan sumber pendanaan.



Gambar 7. Pendampingan Legalitas Usaha dan Pembentukan Forum Kolaboratif

Secara umum, program PKM ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan BUMDes serta pemberdayaan pelaku UMKM. Kemudian, kegiatan ini juga menjadi alasan terbentuknya forum kolaboratif antara BUMDes dan UMKM menjadi ruang koordinasi yang berfungsi sebagai ekosistem kewirausahaan lokal. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pemahaman terkait UMKM, design produk yang dapat menarik perhatian konsumen atau publik yang terlebih dahulu dilegalisasikan pada pihak instansi terkait, sehingga dapat menjadi peluang

bisnis yang unggul ke masa depan. Karena, selain aspek ekonomi, kegiatan ini juga berdampak pada peningkatan kapasitas sosial masyarakat. Adanya kolaborasi lintas kelompok dalam mengelola potensi lokal menghidupkan semangat gotong royong dan kepedulian kolektif. Studi oleh Febryani et al., (2019) menunjukkan bahwa penguatan ekonomi desa yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada aspek manajerial, tetapi juga pada integrasi nilai sosial dan budaya lokal dalam setiap kegiatan usaha. Kegiatan PKM ini mempertegas pentingnya sinergi antara penguatan kapasitas manajerial dan inovasi berbasis lokal. Keberhasilan Desa Bekiung dalam mengembangkan BUMDes dan UMKM lokal memberikan gambaran bahwa penguatan ekonomi desa memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pemetaan kebutuhan hingga pendampingan implementatif. Maka, hasil PKM ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Tersusunnya sistem manajemen BUMDes untuk membentuk UMKM Desa Bekiung; 2) Terjadinya peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang UMKM; 3) Adanya pemahaman masyarakat dalam mengolah bahan baku sebagai potensi desa yang dapat dikembangkan dengan mendatangkan pakar ahli di bidangnya; 4) Adanya temuan produk unggulan yang dapat dikembangkan yaitu produk pakan ternak yang terbuat dari cacing dan limbah pertanian serta sampah. Adapun hasil dari kegiatan PKM ini, juga dapat digambarkan sebagai berikut;



Meskipun kegiatan ini menunjukkan hasil positif, beberapa tantangan tetap dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi sebagian masyarakat, serta fluktuasi bahan baku produksi. Namun, tantangan ini dijadikan sebagai bagian dari pembelajaran kolektif untuk perbaikan ke depan. Tetapi, tantangan ini juga memberikan peluang bagi kemajuan BUMDes Bangun Mandiri, karena dukungan masyarakat dan pemerintah desa sangat tinggi, dan motivasi yang diberikan pemerintahan desa dalam perkembangan BUMDes Bangun Mandiri juga sangat besar. Dukungan ini menjadi kekuatan penuh bagi kemajuan BUMDes Bangun Mandiri di masa depan, dengan kapasitas organisasi yang optimal di segala bidang.

Kesimpulan dan Saran

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini berhasil menunjukkan bahwa penguatan kapasitas manajerial BUMDes Bangun Mandiri dapat menjadi pendorong utama dalam mengoptimalkan potensi UMKM produk lokal di Desa Bekiung. Melalui pendekatan *need assessment* dan partisipatif, tim pengabdian mampu memetakan permasalahan secara akurat dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perubahan. Pelatihan dan pendampingan manajerial secara langsung berdampak pada peningkatan kemampuan pengurus BUMDes dalam aspek perencanaan, keuangan, kepemimpinan, serta manajemen usaha. Program inkubasi bisnis lokal telah memberikan hasil positif terhadap pelaku UMKM, baik dalam hal peningkatan kualitas produk, legalitas usaha, branding, maupun akses pasar digital. Kegiatan ini memperlihatkan bahwa kolaborasi antara BUMDes dan UMKM lokal tidak hanya meningkatkan daya saing produk desa, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi desa secara keseluruhan. Secara keseluruhan, PKM ini berhasil, yaitu 1) meningkatkan kompetensi manajerial pengurus BUMDes; 2) memberikan nilai tambah pada produk lokal desa; 3) mendorong kemandirian ekonomi masyarakat; dan 4) membangun pola hubungan kemitraan antara pelaku usaha dan lembaga desa secara produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan kesimpulan ini, maka saran yang dapat diberikan adalah 1) Diperlukan penguatan literasi digital bagi pelaku UMKM dan pengurus BUMDes agar lebih siap dalam menghadapi era transformasi digital, termasuk pemanfaatan e-commerce, media sosial, dan sistem pembayaran digital; 2) Pemerintah desa perlu memperkuat regulasi internal dan struktur organisasi BUMDes agar memiliki dasar hukum, pembagian tugas, dan tata kelola yang jelas. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan keberlangsungan usaha desa; 3) BUMDes didorong untuk membangun kemitraan dengan lembaga keuangan mikro, koperasi, lembaga pelatihan, dan pelaku pasar sebagai upaya ekspansi usaha dan penguatan jaringan distribusi produk lokal.

Daftar Pustaka

- Ana Sopanah, Reni Kurniwati, D. A. (2023). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (Pad) Berbasis Kearifan Lokal. In *Buku Elektronik*.
- Febryani, H., Nurmalia, R., Lesmana, I. M. I., Ulantari, N. K. W., Dewi, D. P. Y. P., & Rizky, N. (2019). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1). <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19865>
- Khairani dkk. (2021). Penguatan Kapasitas Pengelola BUMDes Mozaik Dalam Pengembangan Pariwisata "Getek Online" Melalui Pemanfaatan Digital Marketing Google My Business. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(6), 3301-3315. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/5762>
- Mustanir, A., & Lubis, S. (2017). Participatory Rural Appraisal in Deliberations of Development Planning. *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)*, 163(Icodag), 316-319. <https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.60>
- Ramadhana, W. (2023). Pengaturan Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan Keadilan Ekonomi. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(2), 252-265. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2023.13.2.252-265>
- Redi, A., Marfugah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 6(1), 282. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.13553.2022>
- Rega, C., & Baldizzone, G. (2015). Public participation in Strategic Environmental Assessment: A practitioners' perspective. *Environmental Impact Assessment Review*, 50, 105-115. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2014.09.007>
- Rofii, & Rahim, A. (2024). Perkembangan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Dan Fiqih Siyasah. *Bina Patria*, 18(1978), 2587-2602. <https://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/797>
- Santi. (2024). *WP OP UMKM: Fasilitas PPh Final dan Ketentuan Umum*. <https://www.pajak.go.id/en/node/113050>
- Sembiring, S. (2017). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Kertha Patrika*, 39(01), 16. <https://doi.org/10.24843/kp.2017.v39.i01.p02>
- Sidauruk, T., & Simarmata, J. (2023). (2023). PENYULUHAN PERPAJAKAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI LINGKUNGAN RT002/02, KEBAYORAN LAMA UTARA, JAKARTA SELATAN. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Satya Widyakarya*, 34-50.
- Syarifudin, A., & Astuti, S. (2020). Strategi Pengembangan Bumdes Dalam Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa Dengan Pendekatan Social Entrepreneur Di Kabupaten Kebumen. *Research Fair Unisri*, 4(1). <https://doi.org/10.33061/rsfu.v4i1.3400>
- Wibowo, A. P. S. (2022). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Paska Berlakunya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 7(1). <https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i1.120>
- Winarsih, T., Fariz, F., & Resmawa, I. N. (2024). Penguatan UMKM Melalui Program Inkubasi Kewirausahaan Bagi Pemuda Karang Taruna di Desa Genilangit Kabupaten Magetan. *Science Contribution to Society Journal*, 4(2), 20-29.

